

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Sektor ini dapat tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional. Sehingga perannya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Kondisi yang kurang menguntungkan tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan UMKM, salah satunya yaitu mampu meningkatkan pembangunan ekonomi (Azirin, 2004).

Pertumbuhan UMKM akan menimbulkan dampak positif yang berpotensi dan menjaga stabilitas perekonomian, yang mampu mengatasi beberapa persoalan pokok seperti pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi. Maka strategi pembangunan UMKM harus sebagai sektor yang kompetitif sehingga pengembangannya perlu mempertajam pilihan pada sektor tertentu. Sehingga hasilnya dapat menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Sutrisno, 2004).

Pengembangan UMKM diyakini akan memperkuat ekonomi nasional, dengan beberapa pertimbangan bahwa UMKM pada umumnya berbasis pada sumber sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya. Perekonomian Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat, jika UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil,

dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Setyawati, 2009).

Peranan UMKM sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, berikut adalah UMKM di Provinsi Jambi pada tabel 1.1 :

**Tabel 1.1      UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2018 (Unit Usaha)**

<b>Tahun</b>	<b>UMKM</b>	<b>Persentase</b>
2013	81.552	-
2014	81.959	0.50
2015	81.979	0.02
2016	82.479	0.61
2017	82.700	0.27
2018	83.150	0.54
<b>Rata – Rata</b>		<b>0.38</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2019

Berdasarkan tabel 1.1 data 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat rendah yaitu rata-rata 0.38 persen bagi pemerataan pembangunan dalam sektor industry bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian di Provinsi Jambi, hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. UMKM di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2013 UMKM di sebanyak 81.552 unit, pada tahun 2017 meningkat sebanyak 82.700 unit atau 0.27 persen dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 83.150 unit atau 0.54 persen (Badan Pusat Statistik, 2019).

Ada beberapa factor yang mempengaruhi perkembangan UMKM yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan selain semakin bertambahnya jumlah UMKM maka berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Secara umum peranan UMKM dalam pembentukan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti : pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. UMKM yang mengalami peningkatan dalam jumlah unit usaha cenderung meningkatkan jumlah memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa yang mampu menompang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, berikut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yang meningkat setiap tahunnya pada tabel 1.2 :

**Tabel 1.2      Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2018 (Persen)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Harga Konstan</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>
2013	21.979.350.29	-
2014	23.559.641.99	7.18
2015	24.538.700.00	4.15
2016	25.980.014.05	4.52
2017	26.649.455,35	4,64
2018	27.905.389,06	4,71
<b>Rata – Rata</b>		<b>5.04</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2019

Berdasarkan tabel 1.2 data 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi rata – rata meningkat sebesar 5.04 persen, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 7.18 persen, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 4.15 persen, serta 2016 kembali meningkat menjadi 4.52 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.64 persen dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 4.71 persen (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan berfluktuasi akan tetapi cenderung meningkat rata – rata sebesar 5.61 persen, kondisi ini menunjukkan trend perekonomian Provinsi Jambi yang positif. Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan perlambatan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya krisis keuangan nasional yang menyebabkan Provinsi Jambi merasakan

dampaknya. Terlepas dari krisis keuangan nasional tersebut, Provinsi Jambi mulai mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonominya kembali. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka dapat menimbulkan perlambatan ekonomi di Provinsi Jambi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Jambi, dalam meningkatkan pembangunan tersebut di perlukannya peningkatan dari hasil produksi salah satunya dengan pertumbuhan UMKM yang ada di Provinsi Jambi, dalam hubungan proses input output ini suatu industri harus melalui proses dengan berbagai mata rantai yang menunjukkan tahap –tahap proses dimana hasil produksi pada tahap awal merupakan masukan bagi tahap produksi dalam menambah nilai guna (Firmansyah, 2001).

Faktor lainnya yang mempengaruhi UMKM adalah inflasi menjadi kunci kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi daya beli. Semakin tinggi inflasi maka daya beli masyarakat dapat menurun sedangkan jika inflasi menurun maka daya beli masyarakat dapat bertumbuh, Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM diharapkan akan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, berikut inflasi di Provinsi Jambi pada tabel 1.3 :

---

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi</b>
--------------	----------------

---

2013	7.59
2014	6.63
2015	5.29
2016	3.57
2017	4.24
2018	3.02
<b>Rata – Rata</b>	<b>5.05</b>

**Tabel 1.3 Inflasi di Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2018 (Persen)**

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2019

Berdasarkan tabel 1.3 data 5 tahun terakhir menunjukkan rata – rata tingkat inflasi di Provinsi Jambi sebesar 5.05 persen, tingkat inflasi yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya pada tahun 2013 inflasi sebesar 7.59 persen, menurun pada tahun 2014 sebesar 6.63 persen, pada tahun 2015 inflasi mencapai 5.29 persen, menurun kembali pada tahun 2016 sebesar 3.57 persen, pada tahun 2017 meningkat kembali sebesar 4.24 persen, dan pada tahun 2018 meningkat kembali sebesar 3.02 persen (Bank Indonesia, 2019).

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Berikut adalah SBI yang dapat mempengaruhi pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Suku Bunga Indonesia Tahun 2013 – 2018 (Persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Suku Bunga</b>
2013	6,48
2014	7,54
2015	7,52
2016	5,50
2017	4,75
2018	5.75
<b>Rata – Rata</b>	<b>6.25</b>

Sumber : Bank Indonesia (2019)

Berdasarkan tabel 1.3 data 5 tahun terakhir menunjukkan rata – rata tingkat suku bunga sebesar 6.25 persen, tingkat SBI yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya pada tahun 2013 SBI sebesar 6.48 persen, meningkat pada tahun 2014 sebesar 7.54 persen, pada tahun 2015 SBI menurun mencapai 7.52 persen, menurun kembali pada tahun 2016 sebesar 5.50 persen, pada tahun 2017 menurun kembali sebesar 4.75 persen dan pada tahun 2018 menurun kembali sebesar 5.75 persen (Bank Indonesia, 2019).

Kondisi suku bunga umumnya masih tetap tinggi, apalagi bunga pinjaman usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap bertahan di kisaran 20% lebih per tahun. Harusnya khusus kredit UMKM, Bank Indonesia bersama pemerintah perlu memikirkan adanya subsidi bunga di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi saat ini. Pasalnya, dengan suku bunga khusus misalnya tidak lebih dari 15% per tahun, akan mendorong pengusaha UMKM bisa survive dan menjadi pilar pendukung ekonomi nasional.

Adanya UMKM diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi melalui kontribusi sumbangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyaknya jumlah UMKM menunjukkan adanya trend peningkatan jumlah tiap tahunnya seharusnya dapat memberikan sumbangan yang tinggi terhadap perekonomian, namun kenyataanya dunia usaha tidak terlepas dari

turbulensi dan resiko keuangan, dalam perkembangan UMKM resiko menjadi lebih tinggi karena aset yang kecil membuat dana usaha habis dalam pembayaran kewajiban, terutama saat inflasi dan suku bunga tinggi. Kenaikan inflasi dan suku bunga akan membuat biaya keuangan dalam usaha semakin tinggi, sehingga dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha. Selain itu, permodalan merupakan tantangan yang paling penting dalam usaha pengembangan UMKM. Faktor modal bagi UMKM menjadi penting, sebab UMKM seringkali mendapatkan peluang usaha yang cukup besar. Namun, kondisi permodalan yang minim membuat UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Melihat kondisi di Provinsi Jambi dimana sektor UMKM merupakan usaha yang dominan dengan jumlah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan kajian diatas dapat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Provinsi Jambi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu

1. Bagaimana pertumbuhan UMKM, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018 ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia terhadap jumlah unit usaha UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan UMKM, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia terhadap jumlah unit usaha UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai Pertumbuhan Ekonomi.
2. Bagi Praktisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mempertimbangkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Industri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Beberapa kementerian di Indonesia, menerapkan definisi yang berbeda untuk UMKM. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai contoh: (1) usaha kecil menurut Departemen Perindustrian adalah perusahaan yang mempekerjakan 5-10 karyawan, (2) usaha kecil menurut Departemen Perdagangan adalah perusahaan yang memiliki modal minimal Rp.500.000, (3) usaha kecil menurut Departemen Pertanian adalah perusahaan yang memiliki lahan minimal 2 Hektar. Masing-masing departemen mendefinisikan sesuai dengan lingkup departemen terkait.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Dilihat dari kepemilikan aset, pemerintah memberikan batasan tentang Usaha kecil yaitu: (1) memiliki kekayaan bersih (*aset*) bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2), hasil penjualan tahunan lebih

dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar, (3) milik warganegara Indonesia, dan (4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Sementara Usaha Menengah adalah: Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: (1) a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), (2) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak, (3) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengertian mengenai UMKM tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara *independent*, tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif. Tapi usaha yang bersifat kewirausahaan adalah usaha yang pada awalnya bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan dengan praktek-praktek inovasi strategis.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Pengertian UMKM menurut UU No. 9/1999 setidaknya ada lima instansi yang mendiskripsikan UMKM sesuai dengan kriteria masing-masing:

1. Badan pusat statistik, menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang digolongkan sebagai industri kerajinan dan rumah tangga, perusahaan dengan 5-19 orang digolongkan sebagai industri kecil.
2. Bank Indonesia mendefinisikan UMKM berdasarkan asetnya. Dimana UMKM diartikan sebagai usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), yang bernilai kurang dari 600 juta rupiah.

Menurut UU No. 9 tahun 1995 ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan paling bersih sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Milik warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Kelebihan dan kekurangan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan
  - a. Organisasi internal sederhana.
  - b. Mampu meningkatkan ekonomi masyarakat / padat.
  - c. Relative aman bagi perbankan dalam pemberian kredit.

- d. Mampu memperpendek rantai distribusi.
- e. Bergerak di bidang yang cepat menghasilkan.
- f. Fleksibilitas dalam pengembangan usaha.

## 2. Kekurangan

- a. Lemah dalam berwirausaha dan terjal.
- b. Keterbatasan persediaan keuangan.
- c. Ketidak mampuan pemenuhan aspek pasar.
- d. Keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi.
- e. Ketidak mampuan informasi.
- f. Tidak didukung kebijakn dan regulasi memadai.
- g. Tidak terorganisir dalam jaringan dan kerja sama
- h. Sering tidak memenuhi standar yang ada.

Klasifikasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Suatu komite untuk pengembangan ekonomi mengajukan konsep tentang Usaha Kecil dan Menengah dengan lebih menekankan pada kualitas atau mutu dari pada kriteria kuantatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil, menengah dan besar. Ada empat aspek yang digunakan dalam konsep usaha kecil dan menengah tersebut, yaitu pertama, kepemilikan; kedua, operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal; ketiga, wilaya operasinya terbatas pada lingkungan sekitar, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya; keempat ukuran dari perusahaan lainnya dalam bidang yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerjaan atau karyawan atau satuan lainnya yang signifikan (Partomo dan Soejodono, 2004).

Menurut Partamo dan Soedjono 2004, Usaha Kecil dan Menengah dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil dan Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

Menurut Soetrisno (2004), Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha. Karakteristik usaha kecil di Indonesia dapat dipisah menjadi dua bagian. Menurut Tambunan (2002), beberapa karakteristik yang paling melekat pada sebagian besar UMKM antara lain: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada sektor UMKM, (2) Rendahnya

produktifitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya gaji dan upah, (3) Kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah, (4) mempekerjakan tenaga kerja wanita lebih besar daripada pria, (5) lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut, (6) kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru, serta (7) kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial.

Selain karakteristik tersebut diatas, menurut Sucherly (2004) beberapa karakteristik usaha ini antara lain: (1) skala usaha kecil baik dilihat dari modal, tenaga kerja, dan pasar, umumnya terdapat di perdesaan, kota kecil atau pinggiran kota besar dengan status kepemilikan pribadi, (2) status usaha milik pribadi dan keluarga, (3) sumber TK berasal dari lingkungan social budaya (etnis atau geografis), (4) pola kerja sering paro waktu atau berupa usaha sampingan, (4) pengelolaan usaha yg sederhana dan terbatas dalam mengadopsi teknologi, (5) sangat tergantung pada sumber modal sendiri, (6) sering tidak memiliki izin usaha dan persyaratan usaha tidak dipenuhi, (7) strategi perusahaan sering tergantung pada lingkungan, (8) manajemen usaha tidak dikelola dengan baik (keuangan, organisasi dll), dan (9) Kebanyakan Uaha kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup. Karekteristik yang terakhir juga cukup menonjol.

### **2.1.2 Konsep Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian (Arsyad, 2010):

a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus.

b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.

c. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang.

d. Perbaiki sistem kelembagaan di segala bidang. Kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 (Dua) aspek, yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun informal). Menurut Todaro (2000), pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Menurut Todaro (2000), proses pembangunan harus mempunyai tiga tujuan inti, yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan kesehatan, dan perlindungan keamanan).
- b. Peningkatan standar hidup yang hanya berupa peningkatan pendapatan, namun juga meliputi penambahan penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan, dimana semuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk menumbuhkan jati diri bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan.

#### **A. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama setahun tanpa memperhatikan pemilik kegiatan tersebut. PDRB per Kapita adalah Nilai PDRB dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang bersangkutan. PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrumen lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah.

PDRB juga dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Ada tiga metode perhitungan yang digunakan (Jhingan 2002), yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Dari segi pendapatan, PDRB jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan

bagian yang harus diperhitungkan dalam penyusunan PDRB melalui pendekatan pendapatan ini.

3. Dari segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto merupakan selisih ekspor dikurangi impor.

Adam Smith dalam Amir (2007) menurut sumber-sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya selama sumber-sumber alam tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, maka yang memegang peranan penting dalam proses produksi adalah dua faktor produksi yang lain yaitu: jumlah penduduk dan stok modal yang ada.

Unsur pokok dari system produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu: Pertama, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Artinya jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersedia telah digunakan secara penuh.

Kedua, sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Artinya jumlah penduduk akan

menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Ketiga, stok modal merupakan unsure produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal. Alat pengukur pertumbuhan perekonomian ada beberapa macam diantaranya:

a) Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

b) Produk Domestik Bruto Per Kapita (Pendapatan Per Kapita)

Produk domestik bruto per kapita merupakan jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala.

c) Pendapatan Per Jam Kerja

Pendapatan per jam kerja merupakan upah atau pendapatan yang dihasilkan per jam kerja. Biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja lebih tinggi daripada di negara lain, boleh dikatakan Negara yang bersangkutan lebih maju daripada negara yang satunya. Beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi di atas dipilih oleh suatu negara dengan keadaan ekonomi di negara tersebut. Peningkatan atau penurunan GDP ditentukan oleh beberapa factor. Factor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu tenaga kerja, capital, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor sosial.

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Amir (2007) PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000.

Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan (Tan, 2010).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negaramaju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan di negara sedang berkembang (Arsyad,2010).

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya (Mankiw. 2003).

## **B. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Arsyad (2002) teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai factor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka

panjang, mengenai bagaimana factor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biayanya diukur dengan menggunakan data produk domestic bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. Produk domestic bruto (PDB) adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Nanga, 2001).

Menurut Sadono Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2011)

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan semakin banyak jenis barangbarang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi tersebut mempunyai tiga komponen yaitu (Simon Kuznet dalam Todaro, 2006). Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo,2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah ekspansi berkelanjutan dari kemungkinan produksi sebagai peningkatan PDB riil selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan

ekonomi yang cepat dipertahankan selama beberapa tahun dapat mengubah Negara miskin menjadi salah satu yang kaya. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai perubahan persentase tahunan GDP riil. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan rumus sebagai berikut menurut Amir, (2007) :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_1 - PDB_{-1}}{PDB_{-1}} \times 100\%$$

Dimana:

PE = pertumbuhan ekonomi  
 $PDB_1$  = PDB tahun analisis  
 $PDB_{-1}$  = PDB tahun sebelumnya analisis

Ahmad dan Latri (2008) menurut Adam Smith, sumber-sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya selama sumber-sumber alam tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, maka yang memegang peranan penting dalam proses produksi adalah dua faktor produksi yang lain yaitu: jumlah penduduk dan stok kapital yang ada.

### **C. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap UMKM**

Dalam analisis makro ekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan jasa. Fungsi produksi menurut mankiw (2006). UMKM merupakan penyedia utama pekerjaan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi (PDB) dipengaruhi

berbagai faktor. Menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah uang beredar riil akan berubah, akibat lebih lanjut adalah terjadi perubahan pada tingkat bunga, apabila tingkat bunga berubah maka investasi juga berubah. Perubahan investasi akan mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Mekanisme ini disebut efek Keynes atau juga sering disebut sebagai efek bunga-Investasi. Berdasarkan hal tersebut dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM (Mankiw, 2006).

### **2.13 Inflasi**

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Apabila terjadi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Salah satu indikator, di Indonesia dan beberapa negara, yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat (Todaro, 2003).

Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut. Menurut Keynes inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga rata-rata, harga adalah dimana mempertukarkan uang dengan barang atau jasa (Mankiw 2006).

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Apabila terjadi kenaikan harga dari satu atau dua barang

saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Salah satu indikator, di Indonesia dan beberapa negara, yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa dalam IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menghitung inflasi adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Pendekatan selanjutnya yang juga digunakan untuk menghitung inflasi adalah dengan menggunakan Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Berikut ini merupakan formula menghitung GDP deflator.

$$\text{GDP deflator} = \frac{\text{nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

Inflasi yang terus berlanjut apalagi sampai melampaui angka dua digit dapat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan alokasi faktor produksi nasional. Selain itu prospek pembangunan jangka panjang merupakan bagian penting dari

kegiatan ekonomi suatu negara. Inflasi akan terus bertambah cepat apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius akan mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan mengurangi impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan perekonomian (Sukirno, 2000).

Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (*overheated*). Artinya kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli uang (*purchasing power of money*) serta dapat mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. Jadi inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya keuntungan perusahaan, sehingga efek ekuitas menjadi kurang kompetitif (Tandelilin, 2001).

Secara keseluruhan, laju inflasi yang sedang berlangsung tergantung pada (i) permintaan, seperti yang ditunjukkan oleh senjang inflasi atau senjang resesi, (ii) kenaikan biaya yang diharapkan, (iii) serangkaian kekuatan luar yang datang terutama dari sisi penawaran. Laju inflasi dapat dipisahkan menjadi tiga komponen yaitu inflasi inti, inflasi permintaan dan inflasi gejolak (Nopirin, 1990). Inflasi inti adalah inflasi yang komponen harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi permintaan yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM, listrik, air minum, dan lainnya, sedangkan inflasi bergejolak adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenaikan inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (*Customer Price index*).

Inflasi dapat dipilah berdasarkan sifat temporer atau permanen. Inflasi yang bersifat permanen adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa. Sedangkan inflasi yang bersifat temporer adalah inflasi yang diakibatkan gangguan sementara (misalnya kenaikan biaya energi, transportasi, dan bencana alam). Adapun cara yang digunakan untuk mengukur inflasi (Nopirin, 2003).

1. Dengan menggunakan harga umum.
2. Dengan menggunakan angka deflator.
3. Dengan menggunakan indeks harga umum (IHK).
4. Dengan menggunakan harga pengharapan.
5. Dengan menggunakan indeks dalam dan luar negeri.

#### **A. Penyebab Terjadinya Inflasi**

Menurut Sadono (2008) penyebab inflasi terjadi dikarenakan dua faktor salah satunya sebagai berikut :

##### **a. Inflasi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation)**

Inflasi akibat tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi karena barang yang diminta (aggregate demand atau AD) melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian (aggregate supply atau AS). Dengan kata lain, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tertentu selalu mengalami peningkatan sementara disisi lain kapasitas produksi tetap atau tidak dapat ditingkatkan. Kapasitas produksi yang lebih rendah dari pada yang dibutuhkan masyarakat tersebut dapat diakibatkan karena dua hal. Pertama, kapasitas produksi yang ada sudah optimal sehingga tidak dapat ditingkatkan lagi. Kedua, kapasitas produksi tidak digunakan secara penuh karena keterbatasan sumber daya yang ada

atau teknologi yang tidak memadai. Kenaikan permintaan ini diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk maupun makin bertambahnya jenis dan jumlah kebutuhan masyarakat.

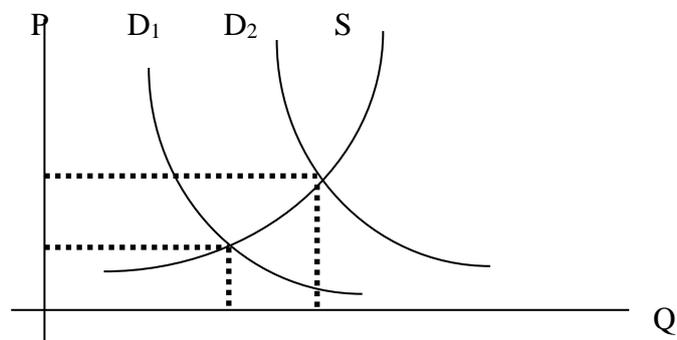
Faktor lain adalah kenaikan pendapatan masyarakat atau juga karena ketakutan akan terjadinya kenaikan harga secara terus menerus dimasa yang akan datang. Peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa lebih besar dari barang dan jasa yang ditawarkan maka mengakibatkan kenaikan harga sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi ini biasanya terjadi pada saat tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga mendorong peningkatan permintaan barang atau jasa sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga secara terus-menerus. Dalam inflasi tekanan permintaan, tidak selalu berarti penawaran agregat (AS) tidak bertambah. Yang pasti walaupun terjadi penambahan penawaran agregat, jumlahnya lebih kecil dibanding peningkatan permintaan agregat.

b. Inflasi akibat dorongan produksi (cost push inflation)

Inflasi desakan biaya atau inflasi dari sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya yang pesat dibandingkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikkan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko pengurangan permintaan barang dan jasa yang mereka produksi dari masyarakat. Kenaikan harga dapat terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Berlakunya kenaikan harga yang menyeluruh tersebut dapat bersumber

dari internal maupun eksternal perusahaan. Dari sisi internal yaitu faktor yang disebabkan oleh perusahaan sendiri seperti kenaikan upah buruh, suku bunga, ingin mendapatkan laba yang tinggi, harga bahan mentah meningkat. Faktor-faktor tersebut menimbulkan inflasi apabila perekonomian sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi (yang akan diikuti kenaikan harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor (cost inflation); dan secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/ swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan impor tersebut (demand inflation).



Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga para produsen barang-barang ekspor tersebut) naik. Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, akibatnya harga barang lain akan naik pula (Latumaerissa, 2011), maka dari itu kegiatan impor dan ekspor juga bisa menjadi sebab dan akibat dari inflasi itu sendiri.

## **B. Dampak Inflasi**

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagai berikut:

- a. Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.
- b. Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun.
- c. Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.
- d. Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi.

- e. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangandi pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.

### **C. Pengaruh Inflasi Terhadap UMKM**

Dalam analisis agregat demand dan agregat supply penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap perusahaa. Berarti penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan (diproduksikan) perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Perbedaan lainnya, yang merupakan perbedaan yang lebih penting, bersumber dari ciri pokok konsep tersebut. Dalam analisis AD-AS ciri penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga.

Sebaliknya, sebagai akibat adanya inflasi dengan nominal money supply yang sama dihasilkan real money supply yang lebih sedikit dari pada sebelumnya. Pendapat kedua dikemukakan oleh A.C. Pigou, menurutnya apabila terjadi perubahan harga dalam suatu perekonomian, maka masyarakat merasa besarnya saldo kas riil mereka berubah. Untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula, mereka berusaha mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi mereka. Perubahan tingkat konsumsi mengakibatkan perubahan tingkat pendapatan nasional (Sadono, 2008).

Selain itu, ketidakmampuan UMKM untuk menyediakan jaminan (agunan) telah menyulitkan UMKM untuk mengakses kredit dari perbankan. Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (rate of return)

dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi pendapatan perusahaan.

Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan yang tercermin pula oleh turunnya return (Nurdin, 1999). Peran pemerintah dalam memajukan perbankan syariah belum begitu bagus, perbankan Indonesia masih didominasi oleh perbankan konvensional. Sejumlah bank masih menghadapi kendala pemenuhan rasio kredit UMKM, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kurangnya kapabilitas bank dalam penyaluran kredit UMKM menjadi kendala utama.

Dari penyaluran dana UMKM masih didominasi oleh perbankan konvensional dengan persentase bunga rendah sebesar 12% pada tahun 2015 dan 9% pada tahun 2016. Data konsolidasi BI menjelaskan peningkatan UMKM yang signifikan ini karena dipengaruhi oleh suku bunga yang rendah. Meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuat bank nonpenyalur KUR semakin kesulitan dalam mendapatkan debitur baru yang potensial. Margin perbankan syariah jauh lebih mahal dibandingkan suku bunga KUR yang rendah, oleh karena itu Perbankan syariah Indonesia masih belum bisa melaju pesat seperti perbankan konvensional.

#### **2.1.4 Suku Bunga Indonesia (SBI)**

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari

meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persen. Menurut Kasmir, (2002) suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Menurut teori dari aliran klasik "*The Pure Theory of Interest*", tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi modal telah dianggap sebagai harga dari kesempatan penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demikian pula tinggi rendahnya bunga modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal.

Menurut teori klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga pada perekonomian akan mempengaruhi tabungan (saving) yang terjadi. Berarti keinginan masyarakat untuk menabung sangat tergantung pada tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran guna menambah besarnya tabungan. Jadi tingkat suku bunga menurut klasik adalah balas jasa yang diterima seseorang karena menabung atau hadiah yang diterima seseorang karena menunda konsumsinya.

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 2011) Apabila dalam suatu perekonomian ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, maka kelebihan pendapatan akan dialokasikan atau digunakan untuk menabung. Penawaran akan *loanable funds* dibentuk atau diperoleh dari jumlah seluruh

tabungan masyarakat pada periode tertentu. Menurut kamus lengkap ekonomi (Pass, dkk, 2000) yang dimaksud dengan tingkat suku bunga (interest rate) adalah jumlah tertentu bunga yang harus dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman atas sejumlah uang tertentu untuk membiayai konsumsi dan investasi. Berikut jenis-jenis suku bunga adalah sebagai berikut :

1. Suku bunga nominal, yaitu tingkat bunga harus dibayar oleh debitur kepada kreditur disamping pengembalian pinjaman pokoknya disaat jatuh tempo, suku bunga nominal merupakan penjumlahan dari unsure-unsur tingkat bunga yaitu tingkat bunga murni, premi resiko, biaya transaksi dan premi untuk inflasi.
2. Suku bunga riil, yaitu tingkat bunga nominal dikurangi laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama.

Menurut Bank Indonesia suku bunga (BI Rate) sebagai suku bunga acuan. Adapun Bank Indonesia mendefinisikan Suku Bunga (BI Rate) adalah “BI Rate adalah suku bunga, kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik”. Menurut Gup E. Benton (1984) dalam Julius R. Latumerissa (2014, 183) menjelaskan mengenai suku bunga adalah sebagai berikut. “Suku bunga adalah harga yang dibayarkan atas penggunaan kredit.” Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono (2011, 278) penetapan tingkat suku bunga (interest Rate) dapat dipengaruhi beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Kelompok Pinjaman, Faktor tersebut adalah cost of funds, premi resiko, biaya pelayanan, termasuk biaya overhead dan personel, margin keuntungan, dan frekuensi repricing.

2. Kelompok simpanan, yang dipertimbangkan adalah cost of funds, biaya pelayanan, termasuk biaya overhead dan personel, marjin keuntungan, struktur target maturity, pricing yield curve simpanan berjangka, Cadangan Wajib Minimum likuiditas (CWM).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Suku bunga (BI Rate) diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga di PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit pada perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor lain dalam perekonomian, suku bunga pasar uang akan menaikkan suku bunga (BI Rate) apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang ditetapkan.

Menurut Bank Indonesia Penetapan Respons (Stances) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dengan cakupan materi bulanan. Berikut adalah jadwal penetapan dan penentuan suku bunga (BI Rate).

1. Respon kebijakan moneter suku bunga (BI Rate) ditetapkan sampai dengan RDG berikutnya.

2. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy) dalam mempengaruhi inflasi.
3. Dalam hal terjadi perkembangan diluar prakiraan semula, penetapan stance kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditinjau bahwa penetapan respon suku bunga (BI Rate) dilakukan pada saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal ini akan mempertimbangkan dan melakukan review atas perkembangan inflasi, nilai tukar dan keadaan moneter serta kondisi likuiditas pasar apakah sesuai dengan hasil yang sudah diperkirakan sebelumnya pada saat RDG. Suku bunga (BI Rate) juga mempertimbangkan berbagai informasi dari eksternal seperti leading indicators, survei, expert opinion,, asesmen faktor risiko, dan juga ketidakpastian serta hasil riset ekonomi.

#### **A. Pengaruh Suku Bunga Indonesia Terhadap UMKM**

Selain kenaikan beban bunga. Tingkat suku bunga SBI yang tinggi dapat menyebabkan investor tertarik untuk memindahkan dananya ke deposito. Hal ini terjadi karena tingkat suku bunga SBI akan diikuti oleh bank-bank komersial untuk menaikkan tingkat suku bunga simpanan. Apabila tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, tentu investor akan mengalihkan dananya ke deposito. Terlebih lagi investasi di deposito sendiri merupakan salah satu jenis investasi bebas resiko. Pengalihan dana oleh investor dari pasar modal ke deposito tentu akan mengakibatkan penurunan UMKM besar-

besaran. Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi berarti tingkat inflasi di negara tersebut cukup tinggi Sunariyah (2011).

Menurut Rahayu (2004) berdasarkan penelitian terdahulu bahwa, Kenaikan tingkat suku bunga yang agresif merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan investor, tetapi UMKM akan menurun karena investor lebih memilih menabung di bank dan menyebabkan investasi melemah. Bila tingkat suku bunga naik tipis, UMKM relatif stabil. Kondisi berbeda dialami jika para investor kelebihan dana, maka mereka akan berinvestasi dengan meningkatkan UMKM. Dalam kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

Menurut Cahyono (2000) berdasarkan penelitian terdahulu bahwa, Terdapat dua penjelasan mengapa kenaikan suku bunga dapat mendorong penurunan UMKM ke bawah. Pertama, kenaikan suku bunga mengubah peta hasil investasi. Kedua, kenaikan suku bunga akan memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi dengan dua cara. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga labanya bisa terpankaskan. Selain itu, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat dan harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen mungkin akan menunda perbeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan perusahaan menurun. Penurunan penjualan perusahaan dan laba akan menekan harga.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Yusuf (2013) pengaruh inflasi dan suku bunga serta pemberian kredit terhadap perkembangan aset umkm di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor biaya seperti inflasi berpengaruh negatif, begitupula suku bunga

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset UMKM, sedangkan pemberian kredit berpengaruh positif terhadap peningkatan aset UMKM.

Khoiruddin (2017) berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sektor makanan dan minuman di Kabupaten Jombang, metode analisis regresi liner berganda, diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan produksi berpengaruh terhadap UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Jombang. Sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap UMKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Jombang.

Kurniawan (2017) berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan UMKM. Sedangkan tenaga kerja, dan kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pertumbuhan UMKM.

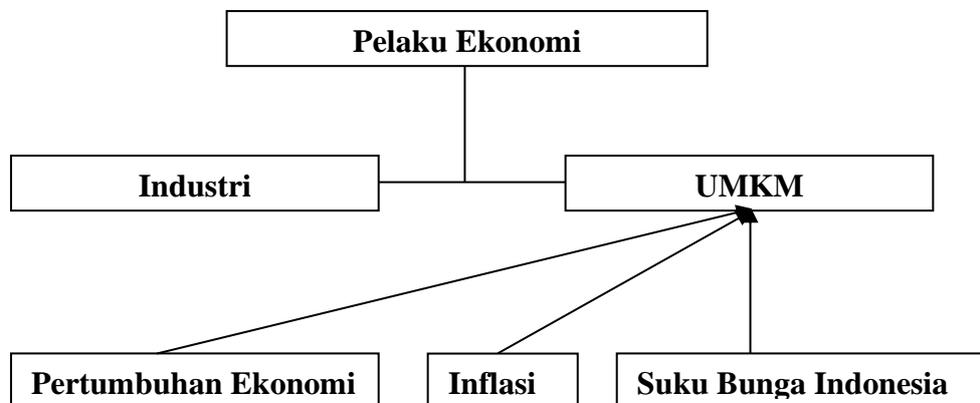
Yustini (2015) pengaruh suku bunga dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah UMKM di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah UMKM di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga dan pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan UMKM di Sumatera Selatan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ini merupakan salah satu usaha yang berperan besar dan menjadi andalan dalam perolehan pendapatan, sebagian besar dari jumlah UMKM terdapat di perdesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagian motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

Namun, hingga sekarang dibanding UMKM di Provinsi Jambi masih dalam pengembangan dikarenakan masih rendahnya investor – investor dalam mendirikan usahanya hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat inflasi yang tinggi dan suku bunga yang tidak stabil, dengan adanya hal tersebut mampu memperlambat pertumbuhan umkm di Provinsi Jambi. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini :



## **Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**

### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan masalah dan teori diatas maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan SBI terhadap pertumbuhan unit usaha UMKM di Provinsi Jambi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan terpercaya yang telah diproses dan kemudian dianalisis lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Data yang digunakan berupa rentang waktu (time series) selama periode 2003 – 2018 yang meliputi :

1. Data Pertumbuhan UMKM Provinsi Jambi
2. Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
3. Data Inflasi Provinsi Jambi
4. Data Suku Bunga Indonesia

##### **3.1.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
2. Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Jambi

#### **3.2. Metode Analisis Data**

Masalah yang pertama yaitu mengetahui pertumbuhan UMKM, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018 menggunakan metode sebagai berikut (Gujarati, 2003):

Perkembangan UMKM

$$\text{UMKM} = \frac{UMKM_{t-1} - UMKM_{t-0}}{UMKM_{t-0}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Ekonomi

$$\text{PDRB} = \frac{PDRB_{t-1} - PDRB_{t-0}}{PDRB_{t-0}} \times 100\%$$

Perkembangan Inflasi

$$\text{Inflasi} = \frac{Inflasi_{t-1} - Inflasi_{t-0}}{Inflasi_{t-0}} \times 100\%$$

Suku Bunga Indonesia

$$\text{SBI} = \frac{SBI_{t-1} - SBI_{t-0}}{SBI_{t-0}} \times 100\%$$

Masalah ke dua yaitu menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia terhadap pertumbuhan unit usaha UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018 menggunakan metode analisis regresi linier berganda adapun rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$UMKM = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 INF + \beta_3 SBI + \varepsilon$$

Keterangan :

UMKM	= Pertumbuhan UMKM (%)
$\beta_0$	= Konstanta Regresi
$\beta_1$ - $\beta_3$	= Koefesien Regresi
PE	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
INF	= Inflasi (%)
SBI	= Suku Bunga Indonesia (%)
$\varepsilon$	= Kesalahan Pengganggu

### 3.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang tersedia layak digunakan dalam proses pengujian hipotesa melalui model analisis regresi berganda atau tidak. Suatu model regresi dikatakan akurat bila estimator –

estimator dari koefisien regresi memenuhi asumsi BLUE ( Best, Linear, Unbiased, Estimator), asumsi klasik tersebut meliputi (Gujarati 2003):

### **1. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi ditentukan. Jika terjadi korelasi maka terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk melakukan uji ini digunakan program Eviews dimana untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel bebas kurang dari satu maka tidak terdapat multikolinearitas.

### **2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu penelitian ke penelitian lain. Jika varian dari residual satu penelitian ke penelitian lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak mengandung situasi heteroskedastisitas. Dasar analisis yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah jika  $Obs * R\text{-square} < X^2$  tabel berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas, sebaliknya jika lebih besar maka terdapat heteroskedastisitas.

### **3. Uji Autokorelasi**

Pengujian autokorelasi dimaksudkan agar mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi dari rangkaian waktu. Hal ini mempunyai arti bahwa komponen pengganggu dari suatu observasi terhadap observasi selanjutnya yang berurutan tidak berpengaruh atau tidak terjadi korelasi. Terjadinya korelasi menyebabkan model regresi dan test signifikansi menjadi tidak

signifikansi lagi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan patokan  $Obs^* R^2 - Square < X^2$  tabel berarti model lolos dari adanya autokorelasi, sebaliknya jika lebih besar maka model tidak lolos dari adanya autokorelasi.

### 3.2.2. Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji – F

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara (Gujarati, 2003):

- a. Menentukan hipotesis yang akan diuji ( $H_0$  dan  $H_a$ )
- b. Menentukan level of significance ( $\alpha$ ) tertentu
- c. Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung
- d. Menarik kesimpulan.

Apabila F-hit lebih besar daripada F-tabel maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas. Nilai F-hit dicari dengan cara sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$F - hitung = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana:

$R^2$  = koefisien determinasi

$k$  = jumlah variabel bebas

$n$  = jumlah observas

Maka dengan derajat tertentu :

- F- hitung < F- tabel, Maka Ho yang diterima artinya secara bersama-sama variabel independen secara signifikan tidak di pengaruhi variabel dependen
- F- hitung > F- tabel, Maka Ho yang diterima artinya secara bersama-sama variabel independen secara signifikan di pengaruhi variabel dependen

## 2. Uji- t

Pengujian tingkat significant dari masing-masing koefisien dari masing-masing regresi digunakan Uji-t test yaitu (Gujarati, 2003) :

- Ho :  $b_i = 0$  Ini artinya variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen
- Ha :  $b_a > 0$  Ini artinya variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara positif
- Ha :  $b_a < 0$  Ini artinya variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara negatif

$$t_{-hitung} = \frac{\beta_i}{SE(\beta_i)}$$

Dimana:

$b_i$  = nilai koefisien regresi

$SE$  = nilai standar error dari  $b_i$

Dengan derajat keyakinan tertentu, maka jika :

- t- hitung < t tabel, Maka Ho diterima dan Ha di tolak, artinya secara individu tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel independent terhadap variabel dependen

- t- hitung > t tabel, Maka Ho di tolak dan Ha di terima, artinya secara individu ada pengaruh yang berarti antara variabelindependent terhadap variabel dependen.

### 3.2.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien ini nilainya antara nol (0) sampai dengan satu (1). Semakin besar nilai koefisien tersebut maka variabel-variabel bebas lebih mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya. Untuk menghitung besarnya determinan ( $R^2$ ) dapat digunakan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana:

$R^2$  = koefisien determinasi

ESS = Jumlah kuadrat residual

TSS = Total jumlah kuadrat residual

n = Jumlah observasi

K = Jumlah parameter (termasuk intersep)

### 3.3. Operasionalisasi Variabel

Untuk membatasi ruang lingkup variabel yang ada, maka akan dijelaskan defenisi operasional variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut :

1. UMKM merupakan pertumbuhan unit usaha sektor usaha kecil dan menengah di Provinsi Jambi setiap tahunnya selama periode 2003 – 2018 dalam satuan persen.

2. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDRB Provinsi Jambi diukur berdasarkan harga konstan tahun 2000 setiap tahunnya selama periode 2003 – 2018 satuan persen
3. inflasi dalam penelitian ini adalah laju inflasi di Provinsi Jambi setiap tahunnya selama periode 2003 – 2018 dalam satuan persen.
4. Suku bunga dalam penelitian ini adalah tingkat nilai suku bunga indonesia tahun 2003 – 2018 dalam satuan persen.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Kondisi Geografis

Provinsi Jambi mempunyai luas sekitar 53.435,38 Km<sup>2</sup> dan terletak antara 0<sup>o</sup> 45' – 2<sup>o</sup> 45' Lintang Selatan serta 101<sup>o</sup> 0' – 104<sup>o</sup> 55' Bujur Timur, membujur di pantai timur pulau Sumatera ke arah barat pada posisi yang strategis dengan batas – batas :

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan
3. Sebelah Timur dengan Selat Berhala
4. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat

Luas wilayah tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu daratan rendah, daratan tinggi dan daerah pegunungan. Luas masing – masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Luas Daerah dan Persentase Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
Kerinci	4.200	7,86
Merangin	6.380	11,94
Sarolangun	7.820	14,63
Batanghari	4.983	9,33
Muaro Jambi	6.147	11,50
Tanjung Jabung Timur	5.330	9,97
Tanjung Jabung Barat	4.870	9,11
Tebo	6.340	11,87
Bungo	7.160	13,40
Kota Jambi	205,380	0,39
Provinsi Jambi	53.435,380	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 Provinsi Jambi beriklim tropis yang dipengaruhi oleh sistem angin Muson dengan curah hujan cukup tinggi. Selama periode 1998 –

2018 curah hujan mencapai sekitar 107 – 312 mm dengan suhu udara minimum dan maksimum rata – rata 22,2<sup>0</sup> C dan 32,8<sup>0</sup> serta kelembaban udara rata – rata 84 persen. Dengan iklim seperti di atas, Provinsi Jambi memiliki hutan tropis yang cukup luas yang terdiri dari hutan suaka alam (602.900 Ha), hutan lindung (181.200 Ha), hutan produksi (1.436.200 Ha), dan hutan konversi seluas 726.900 Ha. Sebagian kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam seluas 588.462 Ha telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Nasional Kerinci Seblat.

#### 4.2 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi

Jumlah penduduk yang besar didasari hanya akan menjadi beban pembangunan jika kualitas rendah, apabila jika distribusi secara geografis tidak merata dan komposisi secara sosial dan budaya sangat beragam. Jumlah penduduk yang banyak akan lebih membantu keberhasilan pembangunan jika kualitas sumber daya manusia efektif, atau sebaliknya. Untuk mengetahui perkembangan penduduk di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.2 ini.

**Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2004 – 2018**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (Persen)
2004	2.619.553	1.98
2005	2.635.968	0.63
2006	2.683.099	1.79
2007	2.742.196	2.20
2008	2.788.269	1.68
2009	2.834.164	1.65
2010	3.092.265	9.11
2011	3.169.814	2.51
2012	3.242.731	2.30
2013	3.317.034	2.29
2014	3.344.421	0.83
2015	3.402.052	1.72
2016	3.420.002	0.53
2017	3.515.017	2,78
2018	3.570.272	1,57
<b>Rata – Rata</b>		<b>2.23</b>

Sumber: Badan pusat statistik Provinsi Jambi 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 menjelaskan pada tahun 2004 – 2018 penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan terus menerus. Pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 9.11 persen dari tahun sebelumnya, dan pertumbuhan penduduk yang rendah terdapat pada tahun 2016 sebesar 0.53 persen dengan rata-rata sebesar 2.23 persen. Pertumbuhan penduduk merupakan masalah demografi yang cukup besar dampaknya terhadap pembangunan ekonomi wilayah, dikarenakan penduduk yang besar tetapi produktivitasnya rendah maka akan berdampak negative seperti tingkat kemiskinan yang meningkat, jumlah pengangguran yang meningkat dan adanya ketimpangan antar masyarakat, akan tetapi apabila pertumbuhan penduduk di suatu wilayah besar yang memiliki produktivitas tinggi maka akan berdampak baik terhadap pembangunan ekonomi wilayah tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengangguran yang menurun, serta angka kemiskinan yang menurun. Maka semua itu tergantung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur factor demografi salah satunya adalah migrasi, kelahiran dan kesehatan.

Rendahnya Pertumbuhan penduduk tahun 2016 pada Provinsi Jambi karena turunnya laju pertumbuhan ini lebih ditentukan oleh turunnya factor demografi seperti adanya perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah lain, dan factor kelahiran , pertumbuhan penduduk rendah dikarenakan pada tahun tersebut penduduk di Provinsi Jambi menerapkan adanya pembatasan jumlah anggota keluarga karena pada tahun sebelumnya angka kelahiran cukup tinggi yang terdapat pada tahun sebelumnya. Namun tingginya pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 ini dikarenakan adanya factor kesehatan masyarakat yang cukup meningkat dengan bertambahnya usia harapan hidup seseorang serta adanya factor perpindahan

penduduk, di Provinsi Jambi pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini dikarenakan Provinsi Jambi merupakan wilayah yang strategis dalam meningkatkan taraf hidup seperti persediaan lapangan pekerjaan yang masih cukup besar, dan juga provinsi Jambi merupakan tempat untuk meningkatkan pendidikan masyarakat baik di wilayah kabupaten maupun provinsi lainnya.

#### **4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi**

PDRB dapat dijadikan salah satu ukuran keberhasilan dari pembangunan suatu daerah. Setiap daerah berupaya memacu aktivitas ekonomi yang terdiri dari sembilan sektor ekonomi. sehingga diharapkan akan selaras dengan kultur dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya sumbangan sektor perekonomian Provinsi Jambi yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi 2004 – 2018 (persen)**

Wilayah	Laju pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten / Kota (Persen)															Rata-Rata
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kerinci	5.12	5.39	5.86	5.89	5.86	5.88	5.89	5.69	7.50	6.16	9.06	6.45	6.70	6.03	5.10	<b>6.17</b>
Merangin	4.85	5.19	4.8	7.02	5.99	8.42	7.85	7.02	6.37	6.45	7.13	5.48	6.21	5.55	5.76	<b>6.27</b>
Sarolangun	5.88	5.36	7.82	7.27	7.62	7.99	8.09	8.8	8.49	7.61	5.2	3.09	4.26	4.69	4.88	<b>6.47</b>
Batanghari	5.19	5.84	5.12	5.6	6.24	7.99	8.09	8.8	8.35	6.48	7.56	4.36	4.55	4.82	4.91	<b>6.26</b>
Muaro Jambi	3.95	4.62	4.84	4.86	5.23	5.14	6.05	7.9	7.23	7.15	8.03	5.24	5.43	5.06	5.55	<b>5.75</b>
Tanjung Jabung Timur	3.19	3.67	5.88	4.71	5.71	5	5.78	6.83	2.78	4.57	5.81	1.87	2.7	3.13	3.45	<b>4.34</b>
Tanjung Jabung Barat	7.95	7.81	7.91	7.97	5.99	6.39	6.87	7.85	4.95	5.73	5.85	3.98	3.14	4.25	4.49	<b>6.08</b>
Tebo	4.79	4.74	9.69	5.95	6.08	5.01	5.96	6.78	7.7	7.63	8.83	5.28	5.38	5.60	5.79	<b>6.35</b>
Bungo	4.78	5.39	9.43	8.8	11.1 3	6.39	6.73	7.68	9.65	9.02	6.74	5.13	5.2	5.67	5.89	<b>7.18</b>
Kota Jambi	5.16	5.69	5.93	7.16	6.14	6.47	6.66	6.97	7.67	8.5	8.17	5.56	6.81	4.68	4.87	<b>6.43</b>
Kota Sungai Penuh	-	-	5.85	5.99	5.61	6.3	6.47	6.73	7.09	8.45	7.54	7.06	6.51	6.24	6.39	<b>5.75</b>
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>5.38</b>	<b>5.57</b>	<b>5.89</b>	<b>6.82</b>	<b>7.16</b>	<b>6.39</b>	<b>7.35</b>	<b>8.54</b>	<b>7.03</b>	<b>7.07</b>	<b>7.76</b>	<b>4.21</b>	<b>4.37</b>	<b>4.64</b>	<b>4.71</b>	<b>6.17</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2019

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten / kota di Provinsi Jambi 2004 – 2018 rata-rata sebesar 6.17 persen. pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 8.54 persen. dan terendah pada tahun 2015 sebesar 4.21 persen hal ini dikarenakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih cukup rendah penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di mungkinkan oleh tidak ketersediaan modal dalam mendorong pendapatan domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada Kabupaten Bungo rata-rata sebesar 7.18 dan terendah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 4.34 persen.

Kondisi perekonomian Provinsi Jambi bersifat terbuka. oleh karena itu aspek keruangan (*space*) menjadi model ekonomi wilayah yang saling berinteraksi (*linkages*) atau memiliki berbagai macam simpul-simpul jasa distribusi diantara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Model perekonomian seperti ini akan menjadi salah satu model perekonomian yang berkarakteristik perekonomian wilayah kepulauan sehingga di harapkan mampu dalam meningkatkan mobilitas faktor-faktor produksi dan menjadi andalan untuk memacu perkembangan perekonomian wilayahnya. Dengan demikian sektor-sektor yang berpotensi atau dominan terhadap produksinya serta memiliki nilai tambah (*value added*) baik menurut lapangan usaha (sektor) maupun komponennya akan menjadi daya tarik dan daya kepekaan yang tinggi (*backward and forward linkages*) dan memberi dampak multiplier efek dari sektor-sektor unggulan tersebut terhadap sektor lainnya.

#### 4.4 Kondisi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yaitu 15 – 64 tahun. penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu. tenaga kerja dalam masyarakat merupakan factor yang potensial untuk membangun ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. baik pengukuran pendapatan perkapita. Selain itu. kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa. berikut keternagakerjaan di Provinsi Jambi :

**Tabel 4.4 Jumlah Struktur Ketenagakerjaann di Provinsi Jambi**

<b>Tahun</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>
Angkatan Kerja	1.251.138	1.247.114	1.432.814	1.692.193	1.790.437
Tenaga Kerja	1.071.172	1.113.150	1.360.022	1.624.522	1.721.362
Pengangguran	26.776	10.149	83.278	67.671	69.075

Sumber : BPS Provinsi Jambi. Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.4 struktur ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir terdiri dari Tenaga Kerja. Angkatan Kerja. dan Pengangguran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angkatan Kerja di Provinsi Jambi pada tahun 2000 sebesar 1.251.138 jiwa meningkat pada tahun 2005 sebesar 1.247.114 jiwa meningkat kembali pada tahun 2010 sebesar 1.432.814 jiwa dan pada tahun 2016 peningkatan sebesar 1.692.193 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 1.790.437 jiwa. Sedangkan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi pada tahun 2000 Tenaga Kerja berjumlah 1.071.172 jiwa meningkat pada tahun 2005 sebesar 1.113.150 jiwa meningkat kembali pada tahun 2010 sebesar 1.360.022 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 1.624.522 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 1.721.362 jiwa.

Pengangguran di Provinsi Jambi pada Tahun 2000 sebesar 26.776 jiwa menurun pada tahun 2005 sebesar 10.149 jiwa meningkat kembali pada tahun 2010 sebesar 83.278 jiwa hingga pada tahun 2016 menjadi menurun sebesar 67.671 jiwa dan tahun 2018 sebesar 69.075 jiwa. jumlah penduduk mempunyai hubungan langsung dengan jumlah angkatan kerja. Tingginya jumlah penduduk suatu daerah. semakin tinggi pula jumlah angkatan kerja yang tersedia. Meningkatnya pengangguran merupakan beberapa penyebab salah satunya ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis. jenis pekerjaan. orientasi status atau masalah keahlian khusus.

#### **4.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi**

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makan dan non makan di Provinsi Jambi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga berlaku untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera. Salah satu indikator yang dapat menjadi patokan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yang berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan. Secara logika, bila ekonomi suatu daerah tumbuh maka pendapatan dari para pelaku ekonomi akan meningkat. Dan bila hal ini terjadi dan terdistribusi secara merata maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut tentunya akan berkurang. Adapun tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi Periode 2004 – 2018 (Persen)**

Tahun	Penduduk Miskin	Penduduk	Tingkat Kemiskinan (Persen)	Perkembangan Tingkat Kemiskinan
2004	325.100	2.657.536	12.23	-2.08
2005	317.800	2.647.876	12.00	-1.88
2006	304.600	2.677.755	11.38	-5.17
2007	281.900	2.742.196	10.28	-9.67
2008	261.200	2.788.269	9.37	-8.85
2009	245.000	2.834.164	8.64	-7.79
2010	260.445	3.092.265	8.42	-2.55
2011	251.790	3.169.814	7.94	-5.70
2012	270.200	3.242.814	8.33	4.91
2013	277.700	3.317.034	8.37	0.48
2014	281.750	3.385.171	8.32	-0.60
2015	292.000	3.402.052	8.58	3.13
2016	300.710	3.570.272	8.42	-1.86
2017	289.810	3.515.017	8.24	-2.08
2018	286.550	3.570.272	8.03	-2.66
Rata – Rata			<b>9.23</b>	<b>-2.82</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa kemiskinan di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan kemiskinan pada tahun 2004 – 2018 rata-rata sebesar 9.23 persen atau menurun sebesar 2.82 persen pertahun. Hal ini dikarenakan program pemerintah Provinsi Jambi dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jambi cukup berhasil dapat dilihat penurunan kemiskinan setiap tahunnya pada tahun 2001 tingkat kemiskinan meningkat sebesar 5.99 persen menurun kembali pada tahun 2005 tingkat kemiskinan sebesar 12.00 persen terus menerus menurun pada tahun 2010 tingkat kemiskinan sebesar 8.42 persen atau menurun menjadi 2.55 persen, hal tersebut dipicu karena pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 tersebut meningkat sebesar 7.35 persen, aka tetapi pada tahun 2015 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 8.58 persen, hal ini dikarenakan adanya perubahan dan terjadi penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat hanya sebesar 4.15 persen, dengan masih rendahnya perekonomian Provinsi Jambi tidak lain adanya faktor pembangunan ekonomi

yang belum mampu mendorong pertumbuhan investasi sehingga dalam meningkatkan penyerapan kesempatan kerja di Provinsi Jambi. Maka masih rendahnya pembangunan ekonomi Provinsi Jambi dapat meningkatkan kemiskinan di Provinsi Jambi setiap tahunnya.

Penurunan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada tahun 2007 tingkat kemiskinan sebesar 10.28 atau menurun sebesar 9.67 persen, hal ini disebabkan karena menunjukkan telah menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan orang tersebut. Demikian secara umum dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di Provinsi Jambi hal ini diperkuat pula dengan menurunnya jumlah penduduk miskin selama periode tersebut (Badan Pusat Statistik). Sedangkan tingkat kemiskinan yang tinggi di indikasi adanya penurunan perekonomian di Provinsi Jambi yang menurun, maka akan berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, sebab perekonomian merupakan factor utama dalam menurunkan angka kemiskinan baik di Negara maupun di provinsi khususnya di Provinsi Jambi karena pada saat ini kebutuhan pokok masyarakat mengalami peningkatan seperti naiknya harga –harga kebutuhan pokok, pada periode ini diharapkan perlunya stabilisasi harga-harga komoditas sehingga kemiskinan di Provinsi Jambi dapat menurun dengan meningkatkan persediaan lapangan kerja baru. Berdasarkan hal tersebut kemiskinan di Provinsi Jambi berfluktuasi karena pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural adalah pemerintah. Sebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin.

#### **4.6 Rata – Rata Tingkat Pendidikan Penduduk Provinsi Jambi**

Hubungan pendidikan dengan pengangguran sangat berpengaruh, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka keahlian juga meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerja Pendidikan perlu mendapatkan sorotan dalam mengatasi kebodohan serta ketertinggalan sosial ekonominya. Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan

penghasilannya melalui peningkatan pendidikan, setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Berikut perkembangan rata – rata tingkat pendidikan di Provinsi Jambi pada tabel 4.6 :

**Tabel 4.6 Rata – Rata Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pendidikan (Persen)</b>	<b>Pertumbuhan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Sekolah</b>
2004	7.4	-	82.68
2005	7.8	5.41	81.58
2006	7.6	-2.56	81.71
2007	7.63	0.39	83.17
2008	7.63	0.00	83.62
2009	7.68	0.66	83.39
2010	7.34	-4.43	84.25
2011	7.48	1.91	87.23
2012	7.69	2.81	88.24
2013	7.8	1.43	91.65
2014	7.92	1.54	95.62
2015	7.96	0.51	95.86
2016	8.07	1.38	96.66
2017	8.15	0.99	96.87
2018	8.21	0.73	97.20
<b>Rata – Rata Pertumbuhan</b>		<b>1.37</b>	<b>85.67</b>

Sumber: Badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jambi 2019 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendidikan di Provinsi Jambi dengan pertumbuhan rata – rata sebesar 1.37 persen pertahun. Peningkatan tertinggi ada pada tahun 2001 dengan rata – rata pendidikan 6.98 persen atau meningkat sebesar 6.89 persen, sedangkan pada tahun 2010 tingkat pendidikan mengalami penurunan dengan tingkat pendidikan 7.34 persen menurun menjadi 4.43 persen.

Pada tahun 2006 tingkat pendidikan menurun sebesar 2.56 persen, hal ini dikarenakan tingkat partisipasi sekolah mengalami penurunan rata-rata sebesar 81.71 persen, pada awalnya pada tahun 2005 angka partisipasi sekolah rata-rata sebesar 81.58 persen. Sedangkan pada tahun 2010 tingkat pendidikan menurun kembali menjadi 4.43 persen, hal ini dikarenakan angka partisipasi sekolah menurun rata-rata sebesar 84.25 persen yang semula pada tahun 2009 tingkat partisipasi sekolah rata-rata sebesar 83.39 persen. Maka hal ini akan berdampak langsung dengan tingkat pendidikan di Provinsi Jambi yang masih rendah dari provinsi lain di Indonesia.

Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan masa depan. Jika dunia pendidikan tidak diperhatikan secara maksimal, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, penting untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Diasosiasikan dengan meningkatnya pencapaian pendidikan dan peningkatan pendapatan dari tenaga kerja terdidik. Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh besar terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dikatakan pembangunan melalui pendidikan dapat dikatakan sangat penting agar menekan tngkat kemiskinan. Selain itu agar penduduk memperoleh pekerjaan yang baik harus disertai pendidikan dan keahlian yang baik.

